

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik adalah konsekuensi dari respon seseorang pada apa yang ia persiapkan mengenai situasi atau perilaku dari orang lain¹. Suatu konflik merupakan hal yang wajar dalam suatu pemerintahan. Konflik yang terjadi didalam organisasi pemerintahan pasti menimbulkan dampak positif dan negatif, dengan demikian konflik bukanlah hal yang harus ditakutkan dalam suatu organisasi pemerintahan tetapi hal yang harus diarahkan menjadi suatu pencapaian tujuan bagi organisasi pemerintahan.

Harus kita akui bahwa didalam pemerintahan pasti terdapat suatu konflik didalamnya yang mempunyai akar permasalahan yang berbeda-beda, seperti halnya konflik yang terjadi di Indonesia konflik yang muncul dari permasalahan adat istiadat, keyakinan, warna kulit, dan lain sebagainya. Hal tersebut dipicu adanya kecenderungan kecemburuan sosial didalam masyarakat yang muncul dengan sendirinya dan akan hilang dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Yogyakarta sebagai suatu daerah yang memegang adat istiadat sebagai nilai keistimewaan tidak lepas dari konflik. Munculnya konflik di Yogyakarta dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan antar kelompok tertentu dan membuat ketidak stabilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berkonflik. Berbagai konflik yang muncul di Yogyakarta didominasi konflik antara

¹<https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38783/4/Chapter%20II.pdf>. Tanggal 4 November 2014 pukul 15.00 wib

pemerintah dengan masyarakat salah satu gambaran konflik yang cukup besar terjadi di daerah Kulon Progo dengan rencana penambangan pasir besi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan mendatangkan investor asing.² Pemerintah kabupaten Kulon Progo yang ingin meningkatkan pendapatan daerah serta membuka lapangan pekerjaan dengan melakukan penambangan pasir besi, namun mendapatkan penolakan masyarakat sekitar karena penambangan pasir besi merusak lahan pertanian yang dimiliki warga sekitar pantai dan membuat lahan menjadi tandus.

Konflik tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul yang menjadi bahan diskusi khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Konflik rencana pengembangan tambak udang di wilayah pesisir Pantai Selatan Kabupaten Bantul mendapatkan perlawanan dari masyarakat pemilik lahan pertanian disekitar pantai karena mengancam sekitar 15 hektare lahan pertanian milik warga terkena imbas keberadaan tambak udang, sekitar 240 tambak udang tersebar di sepanjang pantai selatan Kabupaten Bantul. Konflik penertiban tambak udang ini masih aktual karena sampai saat ini masyarakat masih menolak pengembangan tambak udang.

Konflik tambak udang ini awalnya terjadi karena kurang subur nya lahan disekitar tambak udang yang merupakan lahan pertanian masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul, terdapat keasaman kadar PH antara tanah di sekitar tambak dan air tambak, PH yang terdapat pada air tambak sebesar 7,16, kemudian tanah yang berjarak sekitar

²<http://Harian.solopos.com.baca.2014/03/26> , tanggal 27 November 2014, pukul 14.00 wib

tiga meter dari tambak 7,82. Kemudian derajat keasaman sumur yang berada di dekat tambak sebesar 7,22 , padahal kadar PH di tanah subur biasanya hanya 6,5.³

Berbagai tanaman pertanian seperti cabai, bawang merah, melon, semangka, buah naga, serta sayur-sayuran tumbuh subur menjadi produk pertanian yang berdaya jual tinggi di pasaran. Pertanian lahan pantai merupakan sebagian besar mata pencarian masyarakat pesisir Pantai Selatan. Meskipun demikian lahan pantai yang produktif tidak terwujud begitu saja, namun memerlukan kerja keras masyarakat pesisir Pantai Selatan selama puluhan tahun untuk merubah lahan pasir yang tandus menjadi lahan pertanian produktif.

Pesisir Pantai Selatan yang dijadikan lahan pertanian itu pada awalnya merupakan gump pasir yang tidak produktif. Masyarakat kemudian mengubah ekosistem dari gump pasir menjadi lahan pertanian setelah munculnya ilmu pengetahuan, dan sampai sekarang telah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menopang pendapatan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Bantul ingin menata wilayah Pantai Selatan sebagai suatu kawasan yang tertata dan sesuai visi misi kabupaten Bantul, tetapi masyarakat Pantai Selatan yang menolak keras khususnya pengembangan tambak udang. Alasan utama penolakan tersebut karena lahan pantai merupakan garapan masyarakat sekitar yang sebagian besar petani, dan kurang suburnya lahan sekitar akibat aktifitas tambak udang tersebut.

Tambak udang akan menghilangkan mata pencarian masyarakat sekitar akibat kurang suburnya lahan sekitar tambak udang. Selain itu, tambak udang juga

³<http://jogja.tribunnews.com/2014/09/20/tanah-di-sekitar-tambak-udang-tidak-subur/> , tanggal 28 Maret 2015 pukul 18.00 wib

merusak ekosistem pesisir. Penelitian yang akan dilakukan mengenai konflik tambak udang antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat pesisir Pantai Selatan merupakan kajian yang cukup menarik. Konflik terjadi karena masyarakat Srigading menolak keras adanya tambak udang, hal ini karena lahan di sekitar tambak menjadi tidak subur.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya menyatakan tidak melakukan pembiaran dengan pemberian surat edaran bupati pada bulan April dan Mei 2014, tetapi usaha tersebut masih kalah dengan para pemilik modal. Konflik semakin memanas ketika masyarakat melakukan demonstrasi di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Bantul menuntut sikap tegas pemerintah dan ditutupnya tambak udang di sepanjang Pantai Selatan.

Penelitian ini akan mengkaji apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik, dampak yang terjadi terhadap pengembangan tambak udang, dan upaya-upaya masyarakat dan pemerintah yang terlibat konflik dalam meminimalisir dan menemukan solusi untuk menanggulangi konflik sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana resolusi konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui resolusi konflik yang telah dilakukan dalam konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penyebab konflik konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi akademisi ilmu pemerintahan dalam pengembangan kajian tentang penyelesaian konflik dalam kaitannya dengan penyebab konflik konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya resolusi konflik pada konflikkonflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014?

E. Kerangka Teori

Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih, yang telah diuji kebenarannya.⁴

1. Definisi Konflik

Secara etomologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configure* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini terjadi antar kelompok masyarakat atau pun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi social antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan dari pada persamaan.⁵

Konflik adalah suatu masalah yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat maupun negara. Lebih lanjut pakar memberikan pendapat mengenai konflik dibawah ini

Menurut robbins yang dikutip Sopiah dalam Perilaku Organisasi, konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain

⁴Soerjono Soekanto.1990.*Sosiologi Pengantar*.Rajawali pers.Jakarta.hal 30

⁵Bunyamin Maftuh.2005.Pendidikan Resolusi konflik : *Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik secara Damai*.Program Pendidikan KewarganegaraanUniversitas Pendidikan Indonesia.Bandung.

telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negative pihak lain.

Sedangkan menurut alabens yang juga dikutip Sopiah dalam Perilaku Organisasi, konflik adalah kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.⁶

2. Jenis Konflik

Dikemukakan oleh Soekanto S. yang dikutip Dr. Wahyudi dalam Manajemen Konflik dalam Organisasi, jenis-jenis konflik adalah sebagai berikut :

a) Konflik Pribadi

Konflik antar individu, disadari bahwa setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan, yang berarti tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek jasmaniah maupun rohaniannya. Timbulnya perbedaan individu dikarenakan berbagai factor antara lain : faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama terbentuknya kepribadian.

b) Konflik Rasial

Konflik Rasial, Sumber konflik bukan hanya perbedaan kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya konflik.

⁶ Sopiah.2008.*Perilaku organisasi*.C.V. Andi Offsite.Yogyakarta

c) Konflik antar kelas-kelas Sosial

Konflik antar kelas-kelas sosial, masyarakat terdiri dari beberapa lapisan sosial hidup saling membutuhkan. Jenjang pendidikan dan tingkat kekayaan anggota masyarakat sangat bervariasi. Konflik terjadi manakala sub-sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan proposional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.⁷

Berikut adalah contoh –contoh konflik multidimensi yang dialami bangsa Indonesia.

- Konflik ekonomi

Konflik terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi misalnya terjadi dalam bentuk sengketa tanah pertanian antara anggota masyarakat dan perusahaan perkebunan, antara anggota masyarakat dan lembaga pemerintah, atau antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.

- Konflik bisnis

Konflik bisnis juga terjadi antara pedagang tradisional yang berniaga di pasar tradisional, di warung-warung kampung, supermarket, serta gerai-gerai waralaba. Hadirnya supermarket dan gerai-gerai waralaba menyebabkan para pedagang tradisional tersaingi. Mereka kalah persaingan dalam hal permodalan, harga barang, dan teknologi layanan. Oleh karena itu, di beberapa daerah para

⁷Dr Wahyudi.2011.*Manajemen konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*. Alfa Bcta.Bandung.hal 30-31

pedagang tradisional memprotes hadirnya supermarket dan toko-toko swalayan waralaba di sekitar warung mereka.

- **Konflik politik**

Konflik politik tidak hanya terjadi dalam organisasi politik, seperti organisasi negara dan partai politik, tetapi juga terjadi pada organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam manajemen, dikenal istilah politik organisasi (*organizational politic*), yaitu akumulasi, pembagian, dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi.

- **Konflik agama**

Konflik agama bisa terjadi di antara dua pemeluk agama yang berbeda atau di antara para pemeluk agama yang sama. Konflik agama adalah konflik di antara pemeluk, bukan konflik di antara ajaran atau kitab suci agama.

- **Konflik sosial**

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain sebagai berikut :

1. Konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.
2. Kemiskinan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik sosial.
3. Konflik sosial bisa terjadi karena terjadinya migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.
4. Konflik sosial terjadi antarkelompok sosial yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang inklusif.

- **Konflik budaya**

Budaya adalah norma, nilai-nilai, kebiasaan, asumsi, dan tradisi yang berkembang di masyarakat, diajarkan, dan dilaksanakan kepada para anggotanya sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota masyarakat. Masyarakat beragam jenisnya oleh karena budayanya beragam. Keragaman budaya menimbulkan keragaman sikap dan perilaku.⁸

Dalam konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading termasuk dalam kategori konflik ekonomi jika dilihat dari aspek kesenjangan ekonomi yang ada dalam konflik, konflik bisnis jika dilihat dari aspek besarnya keuntungan yang didapat para pemilik tambak, konflik sosial jika dilihat dari faktor tingginya angka kemiskinan di sekitar tambak, dan faktor politik jika dikaitkan dengan moment pemilihan Kepala Dearah kabupaten Bantul.

3. Pola konflik

Menurut G.R Terry yang dikutip Prof. Dr. Winardi S.E. dalam Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan. Konflik biasanya mengikuti suatu pola teratur yang terdiri dari empat macam tahapan, adalah sebagai berikut:

a) **Timbulnya suatu krisis tertentu**

Di sini terlihat adanya bahaya potensial tertentu. Mereka mengancam pengoperasian secara harmonis serta eksistensi organisasi yang bersangkutan.

Mulai terlihat pertentangan paham secara serius.

b) **Gejala ekalesi ketidaksesuaian paham terjadi**

⁸Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta. Hal 100

Konflik berlangsung, mulai menarik perhatian pihak manajemen. Disarankan perlu adanya tindakan-tindakan korektif tertentu, walaupun pada tahap ini hal tersebut tidak diduga.

c) Konfrontasi menjadi pusat perhatian

Pada tahap ini konfrontasi menjadi pusat perhatian. Hal tersebut menyebabkan diadakannya pembicaraan-pembicaraan antara para manajer yang menduduki peringkat lebih tinggi. Pada tahap ini biasanya disampaikan janji-janji untuk meneliti keluhan-keluhan yang ada, dan kemudian orang mulai menyusun sebuah rencana tindakan selanjutnya.

d) Krisis selanjutnya dialihkan dalam arti :

Dilakukan penelitian tentang apakah keluhan-keluhan yang disampaikan dapat dibenarkan atau tidak. Dipersoalkan proses prosedur-prosedur yang diusulkan untuk kemudian diambil keputusan penerimaan atau penolakan.⁹

4. Kecamatan

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan : Kecamatan dibentuk di wilayah Kabuapten atau kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut UU No.5 tahun 1974, kecamatan dijadikan sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, sedangkan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 diubah menjadi perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

⁹ Prof. Dr. Winardi.2007.*Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan.C.V* Mandar Maju.Bandung.hal 2

Selanjutnya Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang kecamatan yaitu pasal 66 yang menyebutkan :

- a. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota yang di pimpin oleh kepala kecamatan.
- b. Kepala kecamatan disebut Camat.
- c. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- d. Camat menerima pelimpahan wewenang, sebagian wewenang dari Bupati/Walikota.
- e. Camat bertanggungjawab kepada Bupati/walikota.
- f. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁰

5. Teori Konflik

Dalam suatu penelitian teori merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori fase Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram yang dikutip Wirawan dalam konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Fase potensi konflik (*potential conflict phase*)

Dalam fase ini, konflik telah terjadi, tetapi dalam level intensitas sangat rendah. Faktor struktural dan penyebab konflik memicu perbedaan di antara kelompok di samping perbedaan sosiol-ekonomi, kultur, dan

¹⁰ Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 66 tentang Pemerintah Daerah

politik. Para elit mmobilisasi perasaan tidak puas tetapi tanpa mengatalisasikannya ke dalam kelompok yang terorganisasi. Tindakan *preventif* dalam fase ini tidak berisiko dan mempunyai potensi untuk berhasil.

b. Fase pertumbuhan(*getation phase*)

Dalam fase ini, isu yang dipertentangkan dan kelompok-kelompok lebih didefinisikan. Hubungan antarkelompok lebih dipolitisir dan dimobilisasi sedemikian rupa bahkan elit yang memanipulasi ketidakcocokan harus bereaksi dan menanggapi ketidaksepakatan. Ketika polarisasi diantara kelompok meningkat, kemungkinan terjadinya kekerasan makin tinggi dan insiden kecil bisa terjadi. Ikatan dan Hubungan antarelit masih terjadi dan isu yang dipertentangkan masih bisa dirundingkan. Biaya tindakan preventif meningkat tetapi memungkinkan berhasil masih positif.

c. Fase pemicu dan eskalasi (*triggering and escalation phase*)

Persepsi perubahan yang nyata dalam kelompok kondisi ekonomi, social, politik bisa memicu eskalasi. Permulaan kekerasan masal merupakan suatu ambang fundamental konflik. Ikatan antarelit, interaksi sosial memfokuskan pada kekerasan yang teroganisasi ketika pertukaran meredup. Kekerasan meningkat, kelompok yang bertikai kehilangan kepercayaan satu sama lain dan merasa tak dapat berkompromi. Kekerasan membuat intervensi akan berisiko dan mahal. Pada fase ini, tindakan untuk

mencegah kekerasan agar tidak berekalasi ke kelompok lain masih mungkin untuk dilakukan.

d. Fase pascakonflik (*post-konflik phase*)

Sesudah de-ekalasi kekerasan menurun, intervensi preventif dengan tujuan membangun kembali hubungan damai dan saluran komunikasi di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik untuk menghindari terulangnya kekerasan. Menurut Rotchild dan Sriram, fase ini terdiri atas dua bagian yang terpisah.

- o Fase pengembangan militer/keamanan jangka pendek (*security-building phase* *short-term military*) di mana proses pelucutan senjata dan demobilisasi meningkatkan kepercayaan terhadap kedamaian.
- o Fase pengembangan intitusi jangka panjang (*a long-term intitution building phase*) di mana rekonstruksi social, politik, dan ekonomi membantu membangun kembali hubungan anatarkelompok. Pembangunan intitusi dan demokratisasi harus meletakkan fondasi perdamaian berkelanjutan.¹¹

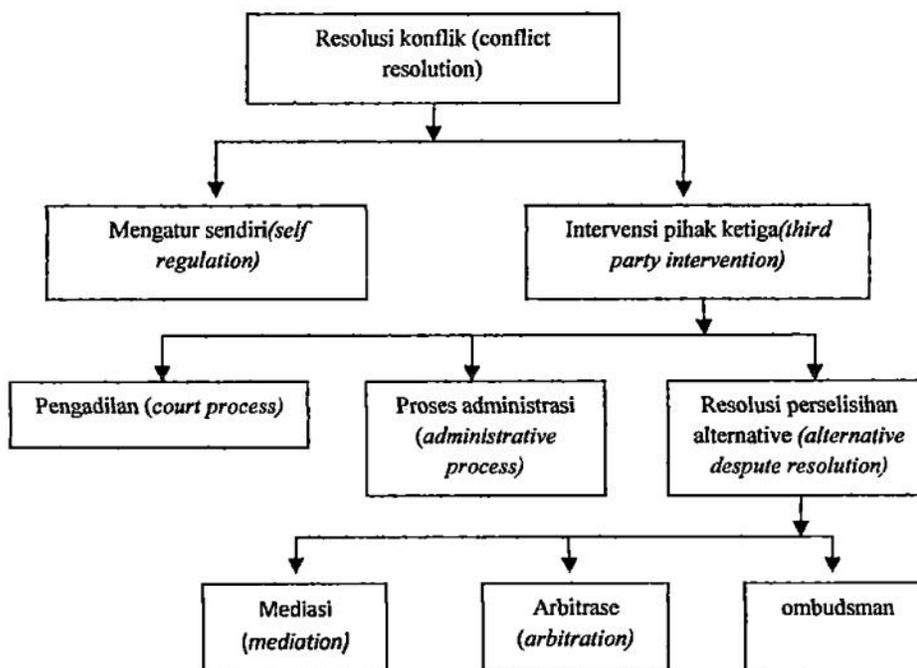
6. Resolusi Konflik

Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh

¹¹Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta. Hal 38-39

pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui pihak ketiga (*third party intervention*).¹²

Dalam resolusi secara garis besar dibagi menjadi dua yakni metode resolusi konflik pengaturan sendiri dan metode resolusi konflik intervensi pihak ketiga. Adapun skema metode resolusi konflik dapat dilihat pada **gambar 1.1**



Gambar 1.1 Metode resolusi konflik

Sumber : Wirawan, 2010.

a. Pengaturan sendiri

Dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Pihak-pihak

¹²Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika, Jakarta. Hal 177

yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan dan negoisasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik yang mereka harapkan.

b. Intervensi pihak ketiga

Dalam keadaan seperti ini, intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) diperlukan. Pihak ketiga disebut *intervener* melakukan intervensi ke dalam konflik. Intervensi pihak ketiga sering kali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka. Pihak ketiga bersikap pasif menunggu datangnya pihak yang terlibat konflik untuk meminta bantuan. Pihak ketiga juga bisa bersikap aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik mereka. Proses resolusi konflik sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Resolusi konflik melalui Pengadilan

Dalam resolusi konflik melalui pengadilan perdata, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugat penggutan kepada tergugat. Pihak lain yang memiliki hubungan dengan objek sengketa juga mengintervensi proses pengadilan.

2. Resolusi konflik melalui proses administrasi

Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh

lembaga Negara bukan lembaga yudikatif yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu.

3. Resolusi perselisihan alternatif

Resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution- ADR*) adalah konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. ADR terdiri atas mediasi dan arbitase. Masing-masing metode ADR akan dibahas lebih terperinci pada bagian selanjutnya.¹³

8. Teori Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Fungsi pemerintah daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

¹³ Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta. Hal 177-194

- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.¹⁴

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual yang di maksud dalam penelitian ini adalah:

1. Konflik

Konflik adalah permasalahan yang terjadi di antara dua belah pihak yang mengalami konflik, kedua belah pihak yang menganggap pihak mereka dalam posisi yang benar sehingga muncul suatu permasalahan.

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah penyelesaian dari suatu konflik yang berlarut-larut dan belum menemui titik temu, sehingga dapat mengurangi suatu permasalahan yang masih berlangsung.

3. Pemerintah daerah

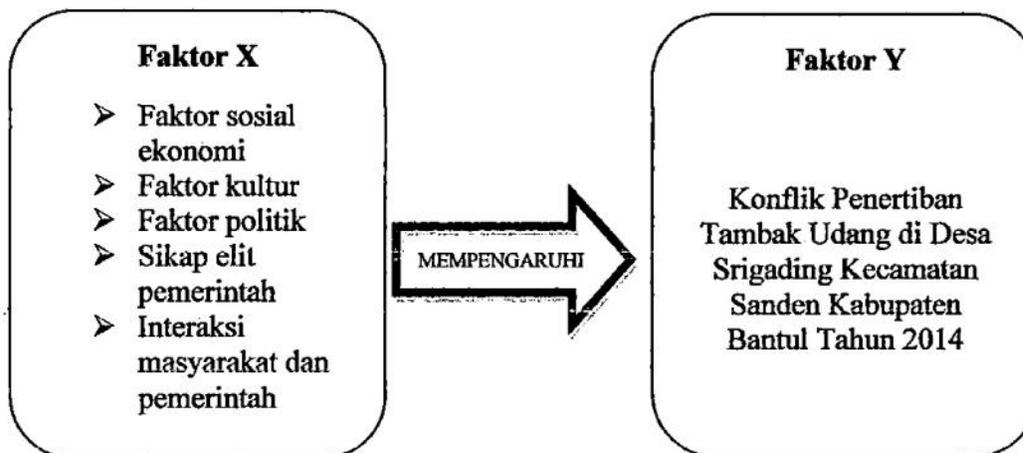
Pemerintah daerah merupakan sistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam suatu pemerintahan.

¹⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang di maksud dalam penelitian ini adalah :

Untuk memahami definisi operasional dalam penelitian ini, peneliti menyusun indicator-indikator yang berangkat dari variabel-variabel dalam penelitian. Indikator-indikator yang telah disusun dapat dilihat dalam **gambar 1.1**



Gambar 1.2 Indikator variabel Konflik Penertiban Tambak Udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2014

a. Faktor sosial ekonomi

Faktor ini menekankan pada tingginya angka kemiskinan yang dipandang memberikan pengaruh pada perilaku masyarakat, dan menjadikan kesenjangan sosial menjadi faktor utama terjadinya konflik. Tolak ukur dari faktor ini semakin besar kesenjangan semakin besar juga potensi konflik.

b. Faktor kultur

Faktor ini menitikberatkan pada kebudayaan atau perilaku baru yang belum mereka kenal, dengan masuknya hal-hal baru yang tidak

sesuai dengan budaya warga setempat. Tolak ukur dari faktor ini semakin besar perbedaan nilai antara budaya baru dan budaya setempat semakin besar potensi konflik.

c. Faktor politik

Dalam faktor ini timbulnya perbedaan kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan perilaku masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat melakukan penolakan dengan adanya kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tolak ukur dari faktor ini semakin banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu permasalahan semakin besar potensi konflik.

d. Sikap elit pemerintah

Faktor ini menitikberatkan pada kurang tegasnya pemerintah dalam memutuskan suatu permasalahan sehingga kebijakan yang di ambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tolak ukur dari faktor ini semakin tidak tegas pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan semakin besar potensi konflik.

e. Interaksi masyarakat dan pemerintah

Dalam faktor ini kurangnya komunikasi yang dijalin pemerintah dan masyarakat tidak terjalin dengan baik, sehingga akibat yang ditimbulkan sangat berefek besar dalam konflik tersebut. Tolak

ukur dari faktor ini semakin sedikit intensitas interaksi semakin besar potensi konflik didalamnya.

Sementara itu terkait dengan resolusi konflik indikator-indikator yang mempengaruhi adalah interaksi, sikap elit pemerintah dan juga sikap masyarakat.

H. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan fakta bahwa lokasi pusat terjadinya konflik terletak di desa tersebut.

¹⁵ Juliansyah Noor.2001.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: Prenada MediaGroup.hal 33-34

C. Unit Analisa Data

Unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pemerintah Desa Srigading, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.¹⁶

Narasumber yang akan diwawancarai adalah :

1. Masyarakat Desa Srigading

¹⁶Juliansyah Noor.2001.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: Prenada MediaGroup.hal 138

- a. Bapak Suparman, ketua koordinator demo sekaligus ketua Aspirasi Petani dan Peternak Samas (Ampas) sekaligus warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul
 - b. Bapak Sukarjowarga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - c. Bapak Sumarno warga Desa Mujimin Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - d. Bapak Abdul Rajib warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - e. Bapak Sukardi warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - f. Bapak Bambang Kurniawan warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - g. Bapak Ngadiran warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - h. Bapak Agus Suprianto warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - i. Bapak Harsoyo warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
 - j. Bapak Mujadi warga Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
2. Pemilik Tambak Udang
- a. Bapak Sunardi selaku pemilik tambak udang

3. Pemerintah Desa Srigading
 - a. Bapak Wahyu Widada selaku Kepala Desa Srigading
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
 - a. Ibu Sri Hardiah Widiarti selaku Kasubid Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
 - a. Bapak Anjar Arintaka selaku kabid Penegak Perda Satpol PP Bantul Kabupaten Bantul
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
 - a) Bapak Eddy Susanto selaku Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
 - b) Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.¹⁷

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di ambil dari sumbernya atau sumber pertama yang berasal dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai

¹⁷Ibid. ,hal 141

sumber dari Pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan masyarakat Desa Srigading.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan kepustakaan dalam hal ini peneliti menggunakan buku, dan internet untuk mendukung peneliti dalam mengolah data dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Patlon, analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Sedangkan penelitian Kualitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel.¹⁹ Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁰ Oleh karena itu model penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

¹⁸ Lexy j. Moloeng. 1993. *Metode Penentuan Kualitatif*. PT Remaja Rusdakarya. Bandung. hal. 103

¹⁹ Juliansyah Noor. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group. hal 33

²⁰ *Ibid.*, hal 34